

Strategi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Semarang

Charis Christiani
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Charis_18@rocketmail.com

Abstrak

Permasalahan kesejahteraan social di kota Semarang dikategorikan ke dalam 7 (Tujuh) isu strategis yaitu i). fakir miskin, (ii). Lanjut usia terlantar, (iii). Penyandang cacat, (iv). Anak terlantar, (v). anak jalanan, (vi). Anak balita terlantar, (vii). Gelandangan dan pengemis atau tunawisma. Dari ketujuh isu tersebut jumlah masyarakat penyandang masalah social di kota Semarang sebanyak 45.183 orang. Jumlah ini termasuk besar bila dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Semarang sebanyak 29.769.676 jiwa.

Langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah Sosialisasi, koordinasi program kegiatan yang ditujukan untuk penanganan Masalah Kesejahteraan Sosisl kepada satuan kerja perangkat daerah, sesuai tugas pokok dan fungsinya secara tegas dan terbuka dengan mengedepankan sinergisitas kegiatan. Lembaga swasta bersama pemerintah dan masyarakat membantu menangani penyandang masalah dengan menyelenggarakan panti-panti atau tempat latihan ketrampilan bagi mereka sampai pada penyediaan lapangan pekerjaan sehingga mereka dapat hidup mandiri.

Kata kunci : farkir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, anak terlantar, anak jalanan, anak balita terlantar, gelandangan

Abstract

Social welfare issues in the city of Semarang categorized into 7 (Seven) strategic issues, namely i). the poor, (ii). Neglected elderly, (iii). With disabilities, (iv). Abandoned children, (v). street children, (vi). Displaced children under five, (vii). Vagrants and beggars or homeless. The seventh issue of the number of people with social problems in the city of Semarang as many as 45 183 people. This includes a large number compared to the population of the city of Semarang as much as 29,769,676 inhabitants. Steps to be taken by the local government is socialization, coordination of program activities aimed at handling problems Sosisl Welfare to work unit, corresponding duties and functions expressly and openly by promoting synergy in the activities. Private institutions with government and communities to help deal with the problem by organizing asylums or places for them to practice skills on job creation so that they can live independently.

Keywords: farkir poor, neglected elderly, disabled, abandoned children, street children, abandoned infants, bum

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial bagi kelompok miskin dan rentan dianggap berhasil, namun ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain: (i). Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi kedalam 4 (empat) pilar intervensi masih sangat terbatas, (ii). Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain, (iii). Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran, (iv). Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri, (v). Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal, (vi). Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknik dan praktis masih terbatas, dan (viii). Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

Kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial telah berhasil melakukan identifikasi terhadap PMKS ke dalam 7 (Tujuh) isu strategis yaitu i). fakir miskin, (ii). Lanjut usia terlantar, (iii). Penyandang cacat, (iv). Anak terlantar, (v). anak jalanan, (vi). Anak balita terlantar, (vii). Gelandangan dan pengemis atau tunawisma.

Kota Semarang sebagai kota metropolitan memiliki persoalan serius dengan pembangunan kesejahteraan sosial ini. Jumlah fakir miskin kota Semarang sebanyak 41.527 orang. Di sisi lain, keadaan PMKS kota Semarang cukup memprihatinkan. Tahun 2011 jumlah lanjut usia terlantar sejumlah 446 jiwa, penyandang cacat 2.508 orang, anak terlantar 357 anak, anak jalanan 179 orang, anak balita terlantar 105 orang kemudian gelandangan dan pengemis sebanyak 61 orang

Untuk itu, penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial melalui perlu terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamatkan agar pemerintah,

pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

B. Fokus Penelitian

Bagaimana strategi, program dan kegiatan yang mengarah pada tercapainya kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Semarang serta formula model penyelenggaraan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang berdasarkan pada kondisi PMKS di Kota Semarang .

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dan Kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi kondisi PMKS, potensi dan permasalahan sehingga dapat terpetakan keadaan PMKS Kota Semarang yang sesuai kondisi di lapangan.
2. Merumuskan strategi, program dan kegiatan yang mengarah pada tercapainya kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Semarang.

D. Kerangka Teori

Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin, dan keterbatasan akses warga miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka.

Anak balita terlantar adalah anak berusia 0 – 4 tahun yang karena sebab tertentu, orangtuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan : miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duanya meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang diundangkan pada tanggal 30 Nopember 1998 merupakan suatu bentuk upaya pemerintah bersama masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di segala aspek kehidupan dan penghidupan guna mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran lanjut usia

Istilah “gepeng” merupakan singkatan dari kata gelandangan dan pengemis. Menurut Departemen Sosial R.I (1992), gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. “Pengemis” adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang.

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari :

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental

E. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT yaitu analisis terhadap potensi, kelemahan / permasalahan, peluang

dan solusi (analisis terhadap Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT) terhadap 7 (tujuh) isu kesejahteraan sosial. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu data dari instansi /Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang terkait serta dokumentasi dari lembaga lembaga lainnya.

II. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kota Semarang

Luas dan batas wilayah, Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 Km². Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 kelurahan. Dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km². Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km² diikuti oleh Kecamatan Semarang

Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km².

Secara demografi, berdasarkan data statistik Kota Semarang penduduk Kota Semarang tahun 2011 adalah 29.769.676 jiwa, yang terdiri dari 17.403.522 penduduk laki-laki dan 12.366.154 penduduk perempuan. Berikut adalah tabelnya:

B. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Semarang

Pembangunan Kesejahteraan sosial di Kota Semarang ditandai dengan fenomena munculnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Perkembangan jumlah PMKS selama kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat, keadaan ini dipacu oleh semakin sulitnya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Semarang sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Semarang

| No | Kecamatan | Fakir Miskin | Lanjut Usia Terlantar | Penyandang Cacat | Anak Terlantar | Anak Jalanan | Anak Balita terlantar | Gelandangan dan pengemis | Jumlah |
|----|--------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------------------|--------|
| 1 | Smg Utara | 11.206 | 48 | 318 | 103 | 50 | 18 | 5 | 11.748 |
| 2 | Smg Timur | 8.387 | 12 | 76 | 13 | 4 | 4 | 1 | 8.497 |
| 3 | Smg Barat | - | - | - | 56 | - | 25 | - | 81 |
| 4 | Smg Selatan | 802 | 17 | 135 | 8 | 36 | 1 | - | 999 |
| 5 | Smg Tengah | 541 | 16 | 164 | 9 | 1 | 6 | 5 | 742 |
| 6 | Ngalian | 2.103 | 4 | 134 | 2 | 20 | 1 | - | 2.264 |
| 7 | Tugu | 1.013 | 4 | 60 | 1 | 1 | - | - | 1.079 |
| 8 | Banyumanik | 1.503 | 20 | 205 | 3 | - | - | - | 1.731 |
| 9 | Genuk | 4.483 | 78 | 182 | 28 | 4 | 4 | 2 | 4.781 |
| 10 | Pedurungan | 2.819 | 33 | 115 | 5 | 13 | - | - | 2.985 |
| 11 | Mijen | 556 | 27 | 175 | 7 | - | 1 | - | 766 |
| 12 | Tembalang | 3.621 | 109 | 406 | 22 | 39 | 22 | 13 | 4.232 |
| 13 | Gunung Pati | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 7 |
| 14 | Gajahmungkur | - | - | 95 | - | 3 | - | - | 98 |
| 15 | Candisari | 2.277 | 49 | 233 | 21 | - | - | 32 | 2.612 |
| 16 | Gayamsari | 2.216 | 29 | 210 | 74 | 8 | 21 | 3 | 2.561 |
| | Jumlah | 41.527 | 446 | 2.508 | 357 | 179 | 105 | 61 | 45.183 |

Sumber data : Disospora th 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi penyandang masalah sosial di kota Semarang masih sangat tinggi dan kecamatan yang mempunyai PMKS paling banyak adalah kecamatan Semarang Utara yaitu sebanyak 11.748 orang. Angka-angka ini menunjukkan semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyak permasalahan sosial yang belum sepenuhnya terselesaikan.

III. ANALISA KEKUATAN/ KELEMAHAN, POTENSI DAN PELUANG WARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA SEMARANG

A. Potensi, Kelemahan dan Kendala dari Isu Strategis PMKS

1. Fakir Miskin

Faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari fakir miskin adalah :

1) Potensi (*strength*)

- a. Memiliki solidaritas sosial yang tinggi
- b. Memiliki mobilitas yang tinggi
- c. Memiliki keuletan
- d. Memiliki orientasi masa depan yang cukup kuat.

2) Kelemahan (*weakness*)

Orang miskin memiliki ketidakberdayaan atau ketidakmampuan (*powerlessness*) dalam hal:

- a. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (*basic need deprivation*).
- b. Melakukan kegiatan usaha produktif (*unproductiveness*).

- c. Menjangkau sumber daya sosial dan ekonomi (*inaccessibility*).
- d. Menentukan nasibnya diri sendiri serta senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik (*vulnerability*);
- e. Membebaskan diri dari mental budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (*no freedom for poor*).

2. Anak Balita Terlantar

Faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari anak balita terlantar adalah :

1) Potensi (*strength*) :

- a. Anak balita lebih mudah dikelola secara psikis pada usia dini.
- b. Banyak hal yang bisa diharapkan dari seorang anak jika mereka dididik sejak awal karena bisa lebih mudah dikontrol jika mereka sudah masuk ke panti.

2) Kelemahan (*weaknessess*) :

- a. Secara sosial bayi tidak mampu untuk menolong diri sendiri
- b. Bayi memiliki fisik yang rentan pada saat harus menyesuaikan dengan lingkungannya.

3) Kendala :

- a. Tingginya jumlah balita yang belum terjangkau oleh sistem pelayanan sosial anak.
- b. Terbatasnya campur cakupan program untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin yang jumlahnya besar.
- c. Belum optimalnya kerjasama antara lembaga-lembaga yang menangani anak balita terlantar.
- d. Belum adanya program yang terencana, terpadu dan berkelanjutan yang menjangkau sasaran dengan lebih adil dan merata melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKSAB)
- e. Kesulitan pemerintah untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan terkini tentang jumlah anak, lokasi dan karakteristik penyandang masalah.

- f. Kelalaian dan ketidakmampuan orang tua / keluarga melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan jasmaniah, rohaniah maupun sosial mereka tidak terpenuhi secara wajar.

3. Anak Terlantar

Faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari anak terlantar adalah :

1) Potensi (*strength*)

- a. Anak lebih mudah diarahkan pada usia dini.
- b. Secara emosional, anak berada dalam tahap belajar mengelola emosi agar tidak mudah marah, belajar untuk berpisah dari orang tua ataupun lingkungan rumah.

2) Kelemahan (*weaknessess*)

- a. Memiliki perilaku yang dinilai menyimpang dari norma umum yang berlaku di masyarakat.
- b. Baik secara pribadi maupun kelompok mereka berupaya mengembangkan sub kultur dengan norma dan nilai yang berbeda dari yang berlaku secara umum.

- c. Berperilaku sosial yang anormatif, acuh tak acuh, curiga pada orang lain yang bukan dari kelompoknya,
 - d. Memiliki sifat-sifat susah diatur, liar, reaktif, sensitif dan bebas melakukan apa saja seperti seksualitas dan sebagainya.
- 3) Kendala :
- a. Kurangnya kesempatan bagi anak-anak miskin dan terlantar dari panti asuhan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas.
 - b. Kurangnya bangunan yang potensial pada anak-anak panti asuhan, sehingga kesulitan menghasilkan sumber daya manusia yang independen dan efektif untuk tenaga kerja.
 - c. Kebiasaan panti asuhan untuk hanya menerima dan bergantung pada sumbangan dengan tidak ada pengembalian atau keuntungan untuk donor mereka dalam proses yang berdasarkan hak, harus timbal balik di alam.
- Kelemahan anak secara umum :
- d. Anak rentan terhadap segala bentuk eksploitasi kekerasan, diskriminasi dan penelantaran
 - e. Anak sebagai sosok yang lemah dan merupakan kelompok yang paling rentan dalam situasi maupun dalam keluarga, masyarakat dan negara
 - f. Anak sebagai individu yang tidak mampu membela dan melindungi dirinya sendiri.
- 4. Usia Lanjut Terlantar**
- Faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari usia lanjut terlantar adalah :
- 1) Potensi (*strength*)
- a. Bagi usia lanjut yang masih potensial, mereka masih dapat diberi kesempatan untuk bekerja dengan diberi ketrampilan.
 - b. Memiliki banyak waktu luang
 - c. Secara medis apabila mereka diberi ketrampilan / kegiatan akan menghambat masa usia pikun dan dapat dijadikan sebagai aktivitas berolahraga.
- 2) Kelemahan (*weaknessess*) :
- a. Keterbatasan secara mental, sosial dan psikologis.

- b. Karena kelemahannya secara fisik, maka usia lanjut tidak potensial dan menjadi beban bagi keluarga atau masyarakat.

3) Kendala :

- a. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan fisik usia lanjut yang masih potensial.
- b. Terbatasnya panti-panti tempat penampungan warga usia lanjut yang potensial.

5. Gelandangan dan Pengemis

Faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari gelandangan dan pengemis adalah :

1) Kekuatan (*strength*)

- a. Adanya keinginan untuk berhenti melakukan kegiatan 'gepeng' bila ada alternatif pekerjaan di desa.
- b. Gepeng memiliki etos kerja yang tinggi untuk memperbaiki kualitas hidupnya (tidak pasrah menghadapi kenyataan hidup yang sulit akibat kondisi alam kering dan tandus
- c. Memiliki rasa malu dan harga diri akan pekerjaan yang dilakukan.
- d. Memiliki kemampuan untuk tetap mempertahankan hidup

dan memenuhi kebutuhan keluarganya.

2) Kelemahan (*weakness*)

- a. Gelandangan dan pengemis dipersepsikan sebagai orang yang merusak pemandangan dan ketertiban umum seperti : kotor, sumber kriminal, tanpa norma, tidak dapat dipercaya, tidak teratur, penipu, pencuri kecil-kecilan, malas, apatis, bahkan disebut sebagai sampah masyarakat.
- b. Gelandangan dan pengemis dianggap sulit memberikan sumbangsih yang berarti terhadap pembangunan kota karena mengganggu keharmonisan, keberlanjutan, penampilan, dan konstruksi masyarakat kota.
- c. Gelandangan dan pengemis, tidak hanya menghadapi kesulitan hidup dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam konteks hubungan sosial budaya dengan masyarakat kota.
- d. Komunitas gelandangan dan pengemis harus berjuang menghadapi kesulitan ekonomi, sosial psikologis dan budaya.

3) Kendala-kendala

- a. Di desa asal 'gepeng' sulit untuk mencari penghasilan (kondisi alam tidak mendukung dan lapangan pekerjaan lain tidak ada) sehingga mereka harus pergi ke kota untuk mencari pekerjaan.
- b. Ada orang yang turut memberi peluang dan dorongan ke warga lain untuk meng 'gepeng' di kota.
- c. Sikap dari masyarakat kota yang suka memberi bila ada 'gepeng' datang mengunjungi rumahnya atau di tempat-tempat umum.

6. Penyandang Cacat

Faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman warga Penyandang Cacat, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1) Kekuatan (*strenght*)

- a. Penyandang cacat masih memiliki motivasi untuk bertanggungjawab secara mandiri.
- b. Banyak dijumpai penyandang cacat yang memiliki kelebihan

husus dibandingkan dengan orang normal pada umumnya.

- c. Karena keterbatasannya, penyandang cacat bisa memfungsikan anggota tubuhnya yang normal untuk menjalankan aktivitas, dan sebaliknya juga mereka bisa tetap melanjutkan fungsi dari anggota tubuh yang cacat.

2) Kelemahan (*weaknesses*)

- a. Pandangan masyarakat yang menganggap penyandang cacat sebagai orang yang tidak potensial dan menjadi beban
- b. Sebagian penyandang cacat yang memiliki sifat kurang percaya diri dan menarik diri dari pergaulan masyarakat
- c. Akses terhadap penyandang cacat yang sulit dijangkau karena kedisambatan, kemiskinan dan ketrampilan.

7. Anak Jalanan

Faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman anak jalanan, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1) Kekuatan (*strenght*)

- a. merupakan aset bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh

dan berkembang dengan optimal.

- b. mempunyai potensi untuk bertahan hidup dengan melakukan aktivitas di sektor informal.

2) Kelemahan (*weaknessess*)

- a. Berpendidikan rendah atau bahkan tidak sekolah
- b. Rentan terhadap eksploitasi ekonomi, kekerasan fisik, sosial dan seks.
- c. Tidak memiliki orang dewasa / keluarga yang bisa merawat dan mendidik mereka.

B. Peluang (*Opportunities*) PMKS

- a. Adanya seluruh peraturan yang mengatur tentang keberadaan PMKS
- b. Adanya kepedulian dari masyarakat terhadap permasalahan kesejahteraan sosial
- c. Masih banyak warga PMKS yang memiliki potensi untuk dikembangkan
- d. Dukungan dari donatur sebagai sumber potensial untuk kesejahteraan sosial.
- e. Banyak perguruan tinggi yang bisa dilibatkan dalam penanganan PMKS

- f. Banyak lembaga/organisasi masyarakat yang bergerak / memiliki perhatian di bidang penanganan masalah sosial.

C. Ancaman (*Threats*) PMKS

- a. Tingginya dinamika dan mobilitas serta kompleksitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seiring dengan perkembangan permasalahan sosial sehingga pencapaian kinerja penanganan sosial seringkali tidak tampak / kelihatan.
- b. Adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa permasalahan sosial merupakan tanggungjawab pemerintah.
- c. Adanya anggapan dari sebagian lembaga / organisasi masyarakat bahwa permasalahan sosial merupakan isu sekunder yang dapat terselesaikan dengan sendirinya dan kurang populer.
- d. Anggaran pemerintah yang diperuntukkan program PMKS tidak sebanding dengan jumlah penyandang masalah sosial.
- e. Belum adanya sarana dan fasilitas umum bagi kelancaran mobilitas (khususnya bagi

penyandang cacat) yang disediakan oleh pemerintah.

- f. Kurangnya kesempatan kerja bagi PMKS (terlebih khususnya penyandang cacat).

IV. Strategi Penanganan PMKS

1. Fakir Miskin

1) Bentuk Kegiatan :

- a. bantuan pangan;
- b. pembentukan Kelompok Usaha Bersama
- c. bantuan perumahan;
- d. bantuan pendidikan dan peningkatan ketrampilan;
- e. bantuan modal usaha;
- f. penyiapan kembali ke daerah asal.

2) Indikator keberhasilan :

- a. Terpenuhiya kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan.
- b. Terlaksananya kegiatan usaha produktif
- c. Terjangkaunya sumber daya sosial dan ekonomi
- d. Terbebas diri dari mental budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang sama.

2. Anak Balita Terlantar.

1) Bentuk Kegiatan :

- a. Reunifikasi Bayi terlantar
- b. Bantuan Kesehatan Bayi dan Lingkungan
- c. Konseling bagi Keluarga
- d. Pelayanan Administrasi.

2) Indikator keberhasilan :

- a. Meningkatnya jumlah anak balita terlantar untuk memperoleh pelayanan kebutuhan esensial,
- b. Meningkatnya aksesibilitas anak balita memperoleh akte kelahiran, orang tua asuh atau alternatif pengasuhan dan akses terhadap sistem sumber pelayanan (kesehatan, pendidikan, sanitasi).
- c. Menurunnya jumlah anak balita yang mengalami keterlantaran, kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan diskriminasi.
- d. Meningkatnya kapasitas orang tua/keluarga dalam menjalankan tanggung jawab dalam pengasuhan dan perlindungan anak.
- e. Meningkatnya kemampuan organisasi/lembaga kesejahteraan sosial anak

dalam memberikan layanan pada anak balita,.

- f. Meningkatnya peran masyarakat (Dunia usaha, Perguruan tinggi) dalam mendukung keberlanjutan layanan pada anak balita.
- g. Meningkatnya Peran Pemerintah Daerah (Dinsos, Dinkes, Dukcapil, Kanwil Kumham) dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan layanan pada anak balita.

3. Anak Terlantar

1) Bentuk Kegiatan :

- a. Pembinaan Kelompok
- b. Pembentukan Forum/Wadah Tempat Beraktivitas
- c. Pembentukan Pusat Informasi
- d. Pembinaan Mental
- e. Bimbingan Keluarga

2) Indikator keberhasilan

- a. orang tua/ keluarga tidak menelantarkan anak (memberikan perawatan, pengasuhan dan perlindungan bagi anak) sehingga hak-hak dasarnya semakin terpenuhi,
- b. anak tidak dieksploitasi untuk tujuan mengemis/ meminta-minta.

4. Usia Lanjut Terlantar

1) Bentuk Kegiatan :

- a. Pelayanan Sosial dalam panti
- b. Pelayanan Sosial Luar Panti
- c. Pelayanan Sosial Perlindungan dan Aksesibilitas
- d. Pelayanan Sosial Kelembagaan

2) Indikator keberhasilan :

- a. Lanjut usia terlantar mempunyai tempat berlindung yang aman
- b. Lanjut usia terlantar yang potensial dapat mengurus dan menghidupi dirinya sendiri.

5. Gelandangan dan Pengemis

1) Bentuk Kegiatan :

- a. Panti
- b. Liposos
- c. Transit home
- d. Pemukiman
- e. Transmigrasi

2) Indikator keberhasilan

- a. Makin banyaknya LKS yang terlibat dalam rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis berbasis masyarakat
- b. Makin banyaknya para pemangku kepentingan yang

- turut berperan serta aktif dalam rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis berbasis masyarakat
- c. Makin banyaknya dukungan anggaran dari berbagai pihak dalam penanganan gelandangan dan pengemis berbasis masyarakat
- d. Ada kesediaan dari gelandangan dan pengemis untuk mengikuti secara aktif dan tuntas rehabilitasi sosial berbasis masyarakat
- e. Ada perubahan sikap dan perilaku dari gelandangan dan pengemis dari yang negatif ke positif.
- f. Makin berkurangnya stigma masyarakat terhadap gelandangan dan pengemis
- g. Makin berkurangnya jumlah gelandangan dan pengemis secara bertahap.

6. Penyandang Cacat

1) Bentuk Kegiatan :

- a. Panti rehabilitasi
- b. Peningkatan ketrampilan
- c. Bantuan Modal
- d. Bantuan Pendidikan
- e. Pemberian lapangan pekerjaan.

2) Indikator keberhasilan

- a. Penyandang cacat mempunyai ketrampilan
- b. Penyandang cacat mampu mengurus dirinya sendiri.
- c. Penyandang cacat dapat menghidupi dirinya sendiri

7. Anak Jalanan

1) Bentuk Kegiatan :

- a. Pendirian Pusat Aktivitas Anak "Children's Center"
- b. Memasukkan Anak Jalanan Ke Lembaga Pendidikan
- c. Peningkatan Pendapatan Keluarga Anak Jalanan
- d. Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pengasuhan Anak Jalanan

2) Indikator keberhasilan :

- a. orang tua/ keluarga tidak menelantarkan anak (memberikan perawatan, pengasuhan dan perlindungan bagi anak) sehingga hak-hak dasarnya semakin terpenuhi;
- b. anak tidak dieksploitasi untuk tujuan mengemis/ meminta-minta;
- c. anak jalanan tidak lagi melakukan aktivitas ekonomi di jalanan, anak kembali

- sekolah, kembali ke keluarga (bagi anak yang terpisah), mengikuti kegiatan peningkatan potensi diri/ keterampilan;
- d. anak terlantar berada dalam asuhan orang tua/ keluarga atau pengasuhan alternatif.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Permasalahan kesejahteraan social di kota Semarang dikategorikan ke dalam 7 (Tujuh) isu strategis yaitu i). fakir miskin, (ii). Lanjut usia terlantar, (iii). Penyandang cacat, (iv). Anak terlantar, (v). anak jalanan, (vi). Anak balita terlantar, (vii). Gelandangan dan pengemis atau tunawisma. Dari ketujuh isu tersebut jumlah masyarakat penyandang masalah social di kota Semarang sebanyak 45.183 orang. Jumlah ini termasuk besar bila dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Semarang sebanyak 29.769.676 jiwa.

Kondisi seperti ini perlu mendapatkan perhatian yang serius baik dari pemerintah, lembaga swasta maupun masyarakat. Pemerintah Daerah harus

melakukan Sosialisasi, koordinasi program kegiatan yang ditujukan untuk penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial kepada satuan kerja perangkat daerah, sesuai tugas pokok dan fungsinya secara tegas dan terbuka dengan mengedepankan sinergisitas kegiatan. Lembaga swasta bersama pemerintah dan masyarakat membantu menangani penyandang masalah dengan menyelenggarakan panti-panti atau tempat latihan ketrampilan bagi mereka,

B. Rekomendasi

1. Pembinaan tetap dilakukan dengan berusaha menyentuh keserasian pemenuhan kebutuhan material dan spiritual serta keserasian pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang.
2. Pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat harus menyediakan tempat bagi proses rehabilitasi sampai tuntas sehingga pentandang masalah social dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Pemerintah, lembaga swasta serta masyarakat menyediakan lapangan pekerjaan bagi

penyandang masalah social yang telah menyelesaikan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2005), *Ilmu Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Depok: FISIP-UI
- _____. (2003), *Pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Depok: FE-UI
- Bappenas, (2004). *Indonesia Progress Report on the Millennium Development Goals*, Jakarta.
- Bina Desa. (1991), *Pendampingan Bagi Masyarakat pedesaan*, Jakarta: Depsos RI
- Departemen Sosial RI. (2007), *Pendoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan Dan Trauma Center*, Jakarta: Depsos RI
- _____. I. (2005), *Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Miskin*, Jakarta: DepSos RI.
- Moeliono, Laurike. & Adi D. (2004), *Pendampingan bagi Anak Jalanan Menurut Pendamping Anak Jalanan*, Jakarta: Save The Children
- Nanawi Hadari. (2005), *Metode Penelitian Bidang Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta : Gaja Mada University.
- Primahendra, R. (2002) *Pedoman Pendampingan Untuk pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta.
- Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat (PPKSM). (2004) *Bimbingan Sosial TKSM Model Peningkatan Ketahanan Sosial Masyarakat (Replikasi)*, Jakarta: Depsos RI.
- Poewardani, E.K. & Agustine R.Basri. (1993). *Laporan Penelitian*. Depok: Bag, Psikologis Klinis F. Psikologi - UI
- Suharto, Edi. (2005), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: Rafika Persada
- UU Republik Undonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial